

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi pada saat ini semakin berkembang pesat hal ini karena semakin dibutuhkannya informasi yang cepat, tepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi tersebut tidak hanya terjadi di lingkup masyarakat tetapi juga terjadi dibagian pemerintahan. Teknologi informasi saat ini bahkan sudah menjadi salah satu kebutuhan primer untuk menunjang pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.

Mengingat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* yang menjelaskan bahwa Indonesia pada saat ini sedang mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang sedang dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan

permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.

Instruksi Presiden tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 yang juga tercantum pada *website* resmi Komisi Informasi Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mensyaratkan bahwa setiap Badan Publik memiliki hak dan kewajiban dalam penyediaan informasi publik. Di bidang keuangan, secara eksplisit disebutkan pada pasal 7 dan 9 bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik. Media penyampaian informasi dapat tertulis maupun disajikan di media elektronik, yang seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh publik. Demikian juga dengan Kementerian Negara/Lembaga juga memiliki hak dan kewajiban dalam penyediaan informasi publik karena merupakan salah satu Badan Publik. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pasal 30, 31 dan 32 tentang Keuangan Negara juga menyatakan bahwa Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBN/D) berupa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kewajiban adanya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah juga diperkuat dengan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat

memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga.

Berdasarkan data yang tercantum di situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jumlah Kementerian Negara/ Lembaga (KNKL) pada tahun 2016 adalah 163 KNKL. Jumlah tersebut dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya, yakni Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebanyak 28 Lembaga, Lembaga Non Struktural sebanyak 88 Lembaga, Kesekretariatan Lembaga Negara sebanyak 7 Lembaga, Lembaga Setingkat Menteri sebanyak 4 Lembaga, Kementerian Negara sebanyak 34 Kementerian, dan Lembaga Penyiaran Publik sebanyak 2 Lembaga. Sedangkan KNKL yang mendapat penilaian kinerja dan bertanggungjawab atas akuntabilitas publik berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 86 KNKL.

Berdasarkan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan peraturan-peraturan yang mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas informasi oleh badan publik, maka pemanfaatan teknologi dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan biaya yang relatif lebih murah sangat diperlukan, hal ini dikarenakan agar terciptanya transparansi dengan biaya yang relatif lebih murah, mudah, dan dapat menghadirkan kemajuan bagi entitas ekonomi. Almilia (2008) mengungkapkan bahwa internet dapat digunakan dalam mengembangkan

penyediaan informasi keuangan dalam hal ketepatanwaktuan penyediaan informasi bagi pengguna informasi keuangan. Dengan adanya media internet juga dapat menghilangkan keterbatasan karena perbedaan wilayah dan juga dapat meningkatkan frekuensi pelaporan informasi keuangan kepada publik mengingat kebutuhan akan penyediaan informasi dengan cepat. Menurut Mohamed, Oyelere, dan Al-Busaidi (2009) kemajuan teknologi telah membuat internet menjadi alat yang berguna, tepat waktu dan hemat biaya sebagai media komunikasi dan informasi kepada para pemangku kepentingan. Internet memiliki potensi kekuatan untuk merevolusi pelaporan keuangan.

Website pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga adalah salah satu sarana untuk tercapainya transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Penelitian tentang transparansi informasi melalui *website* atau lebih dikenal dengan istilah *Internet Financial Reporting* (IFR) dengan menggunakan indeks *content*, *timeliness*, *technology used*, dan *user support* sudah banyak dilakukan pada perusahaan bisnis. Selain itu indeks IFR tersebut telah dikembangkan oleh banyak peneliti untuk mengukur kualitas IFR, diantaranya oleh Botti, Boubaker, Hamrouni, & Solonandrasanan (2014) yang mengukur IFR dengan konten dan *internet presentation*. Konten terdiri dari tiga kategori yang berbeda yaitu: 1) informasi keuangan, 2) informasi tata kelola perusahaan, dan 3) informasi tanggung jawab sosial perusahaan. *Internet presentation* terdiri dari dua kategori yaitu: 1) teknologi, 2) kenyamanan dan ketepatan waktu. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa 28 persen dari perusahaan sampel yang ada terletak pada batas efisiensi untuk semua komponen IFR.

Alam dan Rashid (2014) meneliti keadaan Pelaporan Keuangan melalui Internet (IFR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE), Pakistan. Indeks IFR dalam penelitian menggunakan empat dimensi: *content, timeliness, technology, user support*. Penelitian ini memodifikasi dan menggunakan indeks IFR untuk mengukur pengungkapan sukarela dari perusahaan yang terdaftar di situs Web mereka di Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan *Internal Consistency test*: koefisien *Cronbach* untuk skala IFR adalah 0.81 dan antar-item korelasi antara IFR dan komponen, yaitu, masing-masing *content, timeliness, technology, user support*, adalah 0,92, 0,87, 0,58, dan 0,78. Rata-rata skor IFR adalah 47,24 dengan standar deviasi yang menunjukkan bahwa variasi antara praktik IFR dari perusahaan yang terdaftar di KSE adalah 11,96. Pengungkapan berkisar dari minimal 22 untuk maksimum 69, menyiratkan bahwa ada perbedaan yang besar dalam pengungkapan IFR pada *website* perusahaan yang terdaftar di KSE, Pakistan.

Momany, Al-Malkawi, dan Mahdy (2014) meneliti tentang pelaporan keuangan di internet pada perusahaan yang beroperasi di Negara ekonomi berkembang, yaitu Yordania. Tahap pertama dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan situs web elektronik Global dan Yordania untuk mencari sebuah perusahaan memiliki situs web atau tidak. Kemudian berdasarkan hasil pencarian, perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori: (1) perusahaan yang memiliki situs web dan melaporkan informasi keuangan; (2) perusahaan yang memiliki situs web tetapi tidak melaporkan informasi keuangan; dan (3) perusahaan yang tidak memiliki situs web sama sekali. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki

situs web dan melaporkan informasi keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan data pasar) diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: (1) perusahaan yang mengungkapkan seperangkat laporan keuangan; (2) perusahaan yang mengungkapkan secara parsial atau laporan keuangan ringkasan; dan (3) perusahaan yang mengungkapkan ikhtisar keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87 perusahaan Yordania (69 persen) memiliki situs web dengan sekitar 51 persen (44 dari 87) meliputi laporan keuangan dan 32 dari 44 perusahaan (sekitar 73 persen) menyebarkan semua informasi keuangan mereka di situs web mereka.

Minioui dan Oyelere (2013) meneliti tentang praktik IFR yang terdaftar di UEA. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di *Dubai Financial Market* (DFM) dan *The Abu Dhabi Securities Exchange* (ADX). Dalam menilai publikasi informasi keuangan pada *website*, peneliti mengelompokkan ke dalam tiga kelompok yakni XBRL, PDF, dan HTML. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83 persen perusahaan terlibat dalam IFR dan 63 persen perusahaan tidak terlibat dalam IFR, dengan akurasi keseluruhan 76 persen.

Malhotra dan Makkar (2012) meneliti tentang penggunaan *web reporting* di India, dengan membandingkan antar sektor dalam praktek *web reporting* dan menganalisis penggunaan *web reporting* pada perusahaan yang beroperasi di India. Berbagai item pengungkapan dipertimbangkan untuk tujuan membuat analisis komparatif dari sektor antar-perusahaan. Item pengungkapan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: (1) atribut umum; dan (2) atribut

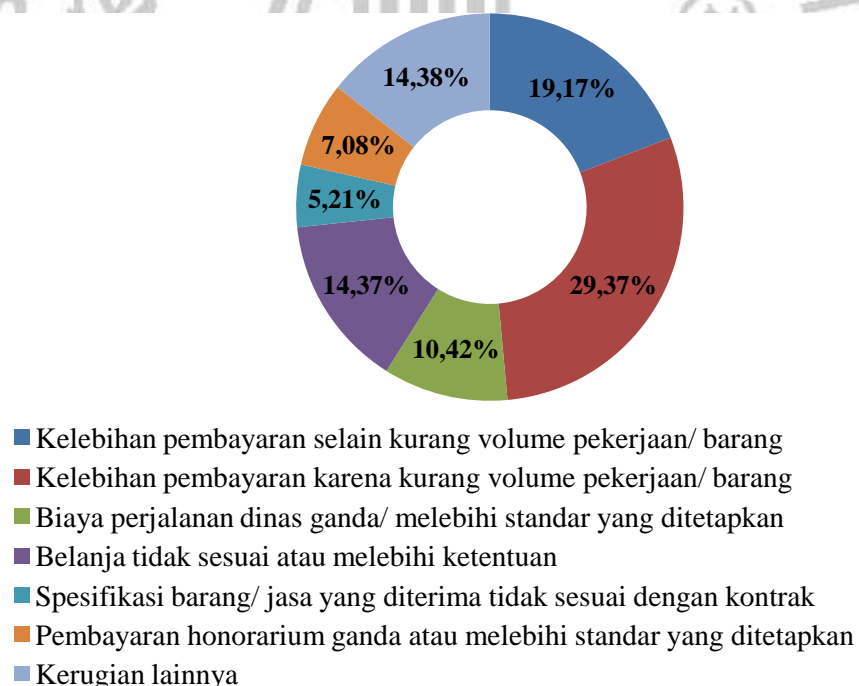
keuangan. Data dikumpulkan ke dalam 35 item pengungkapan: 22 item umum dan 13 item keuangan pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan India sudah mulai menggunakan internet sebagai media untuk pelaporan. Meskipun persentase perusahaan memberikan informasi untuk investor tidak terlalu tinggi, ada kemungkinan kecenderungan meningkat pada sektor korporasi India. Persentase pelaporan melalui internet pada perusahaan India rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Puspita & Martani (2012) yang mengukur IFR menggunakan indeks konten yang menghasilkan bukti bahwa pengungkapan informasi Pemda Indonesia pada *websitenya* pada tingkat 44.84 persen (total pengungkapan), 47 persen (pengungkapan konten) dan 42,61 persen (presentasi pengungkapan). Di sektor lain yakni di perusahaan publik yang terdaftar di BEI hanya 62 persen perusahaan yang telah memiliki *website* untuk mempublikasikan beberapa informasi tentang kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan, dengan indeks IFR diantaranya adalah konten, ketepatanwaktuan, teknologi yang digunakan dan *user support* (Almilia, 2009).

Penelitian yang sejenis tentang pengungkapan IFR di Kementerian Negara/Lembaga telah dilakukan oleh Saraswati (2012) yang menggunakan data anggaran keuangan Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara, kekayaan informasi, jumlah dokumen dan data index. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *website* kementerian dan lembaga tinggi negara Indonesia sudah diterapkan dengan baik serta ditemukan bahwa tidak ada perbedaan antara *website* Kementerian dengan *website* Lembaga Tinggi Negara pada popularitas. Penelitian

pada Pemerintah Daerah yang lain dilakukan oleh Soepriyanto & Aristiani (2011) dengan mengukur IFR hanya menggunakan konten. Hasilnya menunjukkan dari 57 situs web yang digunakan sebagai sampel penelitian maka terdapat 9 situs web yang menyajikan informasi laporan keuangan sesuai SAP atau 15,79 persen atau hanya sebesar 2,30 persen dari keseluruhan jumlah pemerintah daerah yang memiliki situs web.

Berdasarkan fenomena pada tahun 2014, yakni pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) 2014 terungkap 480 permasalahan terkait dengan kerugian negara senilai Rp 488,22 miliar pada 82 entitas. Komposisi kerugian negara berdasarkan permasalahan disajikan pada Gambar 1.1



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015

Gambar 1.1
KOMPOSISI KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN
PERMASALAHAN

Berdasarkan grafik tersebut, komposisi kerugian negara didominasi oleh kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan/barang (19,17%) dan selain karena kekurangan volume pekerjaan/barang (29,37%) seperti kelebihan pembayaran atas jasa konsultansi, jasa kebersihan, dan lain-lain. Secara umum, temuan yang mengakibatkan kerugian negara terjadi pada akun belanja dan aset. Terhadap permasalahan kerugian negara senilai Rp 488,22 miliar, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyetor uang ke kas negara atau menyerahkan aset senilai Rp 65,11 miliar.

Tabel 1.1
NILAI DAN SETORAN ATAS TEMUAN YANG BERDAMPAK
FINANSIAL (RP MILIAR)

Sub Kelompok Temuan	Nilai Temuan	Setoran
Kerugian negara	488,22	65,11
Potensi kerugian negara	1.272,56	3,04
Kekurangan penerimaan	3.816,27	20,40
Jumlah	5.577,05	88,55

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015

Oleh karena itu, dengan adanya keterbukaan informasi akan memudahkan publik untuk memonitor dan mengevaluasi tentang kinerja Kementerian Negara/Lembaga salah satunya melalui anggaran yang digunakan. Hal ini tidak lain karena Kementerian Negara/Lembaga merupakan Badan Publik, dimana anggaran yang digunakan juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan penyajian informasi keuangan pada situs resmi

Kementerian Negara/Lembaga (KNKL). Hal ini dikarenakan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang *Internet Financial Reporting* (IFR) banyak menggunakan objek penelitian perusahaan ataupun Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin menguji menggunakan objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini mengacu pada Botti, Boubaker, Hamrouni, & Solonandrasanan (2014) dengan menggunakan indeks IFR yaitu konten, *timeliness*, teknologi yang digunakan, dan *user support* dan menghilangkan indeks yang tidak berhubungan dengan Pemerintahan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam pengukuran IFR di berbagai sektor seperti di KNKL, Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan *profit-oriented*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat penyajian *content* pada situs resmi Kementerian Negara/ Lembaga di Indonesia?
2. Bagaimanakah tingkat *timeliness* penyajian informasi level indeks *timeliness* pada situs resmi Kementerian Negara/ Lembaga di Indonesia?
3. Bagaimanakah teknologi yang digunakan level indeks *technology used* pada situs resmi Kementerian Negara/ Lembaga di Indonesia?

4. Bagaimanakah tingkat dukungan terhadap pengguna (*user support*) level indeks *user support* pada situs resmi Kementerian Negara/ Lembaga di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) menggunakan indeks IFR yang terdiri dari *content*, *timeliness*, *technology used*, dan *user support* pada situs resmi Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan *Internet Financial Reporting* terutama pada penyajian informasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca khususnya mengenai perbandingan transparansi informasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan bahan informasi untuk peneliti selanjutnya dalam bidang *Internet Financial Reporting* khususnya di Pemerintahan Pusat.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab, diantaranya adalah bab Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian. Berikut ini adalah uraian mengenai bab-bab tersebut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian dan penjelasan mengenai apa yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian, apa saja rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis, tujuan dari penelitian, manfaat yang dihasilkan apabila penelitian ini dilakukan, serta uraian mengenai sistematika proposal ini ditulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan diawali dengan uraian penelitian terdahulu, kemudian landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan juga digambarkan bagaimana kerangka pemikiran penelitian ini. Selanjutnya juga akan dijabarkan mengenai hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam penelitian *non-behaviour*, bab metode penelitian ini menguraikan rancangan penelitian yang akan dilakukan, apa saja

yang menjadi batasan dalam penelitian, serta identifikasi mengenai variabel penelitian yang digunakan. Di dalam bab ini juga dijelaskan mengenai definisi operasional dan pengukuran variabel, kemudian apa saja yang menjadi populasi dalam penelitian ini, sampel apa yang digunakan, serta bagaimana teknik pengambilan sampel ini dilakukan. Data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data apa yang digunakan dalam melakukan penelitian ini juga dijelaskan pada bab ini.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab IV berisi mengenai gambaran subyek penelitian yang menjelaskan garis besar tentang populasi penelitian, analisis data hasil penelitian berupa analisis deskriptif tentang variabel penelitian, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang mengarah kepada pemecahan masalah penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan yang menjelaskan jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan atas penelitian, dan saran yang merupakan implikasi hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk peneliti selanjutnya.